

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Jembrana memiliki komposisi yang relative seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah anak di Kabupaten Jembrana hampir 30 % dari jumlah penduduk lansia sebanyak 1987 jiwa yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Pemerintah Kabupaten Jembrana memiliki program yang memprioritaskan anak-anak dan Lansia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta pemberdayaan Lansia sehingga terwujud Lansia yang tangguh, sehat dan berdaya.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa komposisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat masih belum melukiskan kesetaraan gender yang ideal. Namun, telah ada upaya-upaya dan perhatian Pemerintah Daerah untuk lebih memprioritaskan kesetaraan gender. Hal ini mencerminkan bahwa isu gender dan pemberdayaan perempuan telah mendapat perhatian serius dalam rangka mewujudkan keadilan dalam pembangunan nasional.

Di tingkat nasional, Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dan mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dengan menerapkan Pengarusutamaan Gender melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Melalui instrument yuridis ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif Gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Tentunya kebijakan ini telah ditindaklanjuti di Kabupaten Jembrana dengan menyelenggarakan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pembangunan tanpa memandang jenis kelamin, usia maupun ada tidaknya kecacatan tubuh.

Di Kabupaten Jembrana, Pemerintah Daerah berupaya untuk membuat program pembangunan guna menekan ketimpangan gender yang masih terjadi di berbagai bidang yang mana pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial budaya. Untuk mencapai hasil yang maksimal komitmen pemerintah tersebut tentu harus didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Diharapkan dengan adanya Profil Gender ini, dapat menjadi data pembuka wawasan yang nantinya dijadikan acuan untuk perencanaan dan penganggaran responsif gender sehingga terwujud pembangunan yang berkeadilan.